Lampiran SK Nomor : 188.45/2042/427.75/2019
Tanggal 13 September 2019

1

PETA
PROSES BISNIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG

VISI & MISI

KABUPATEN LUMAJANG

- **Visi**
  Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat

- **Misi ke 2**
  Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

- **Tujuan ke 3**
  Meningkatkankualitas SDM serta pemerataan dan perluasanakseskebutuhandasarmasyarakat

- **Sasaran ke 17**
  Meningkatnya kondusivitas wilayah

- **Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018**

  Membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan pedoman kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati

PROSES BISNIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

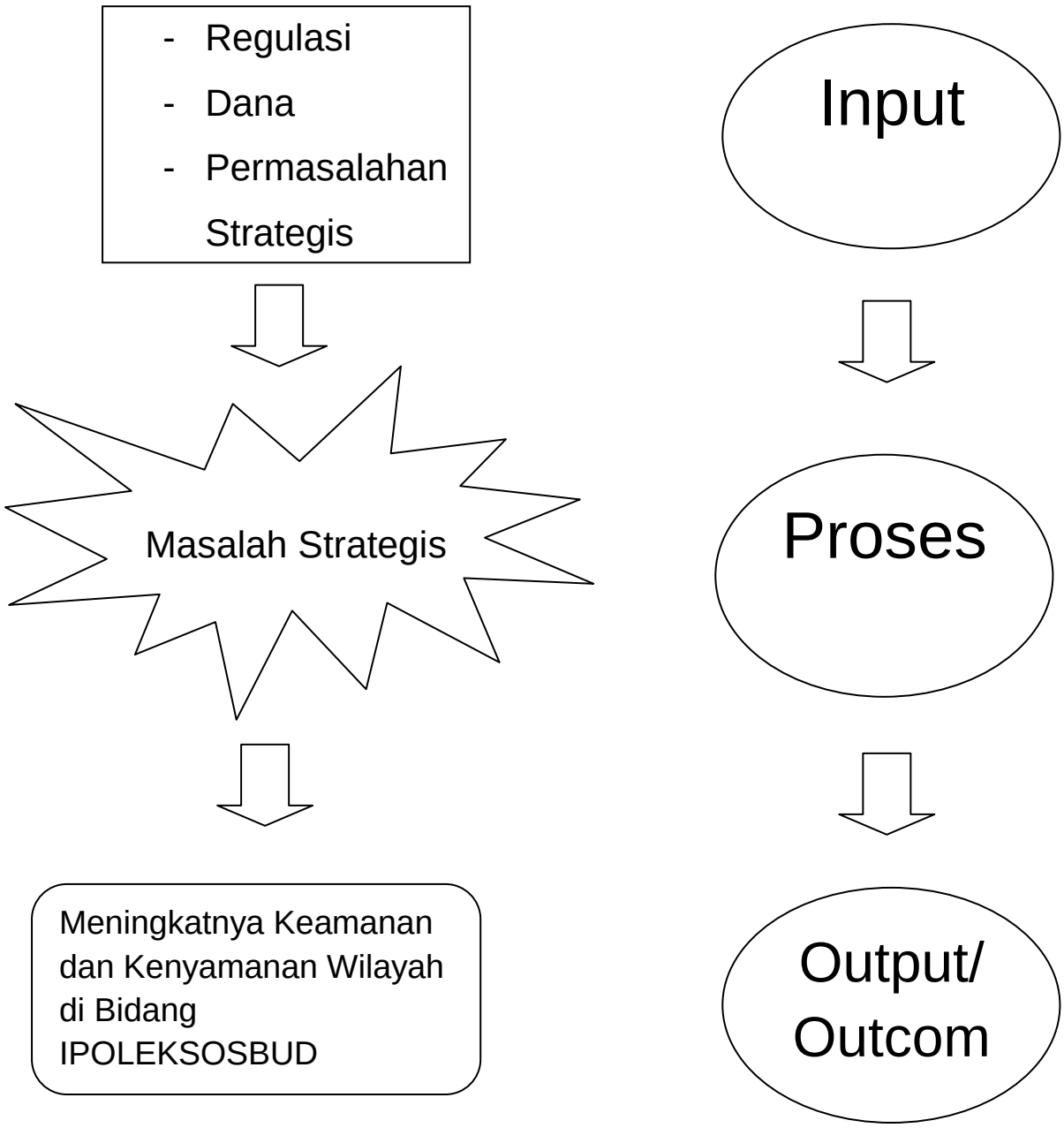

5 SUMBER KONFLIK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

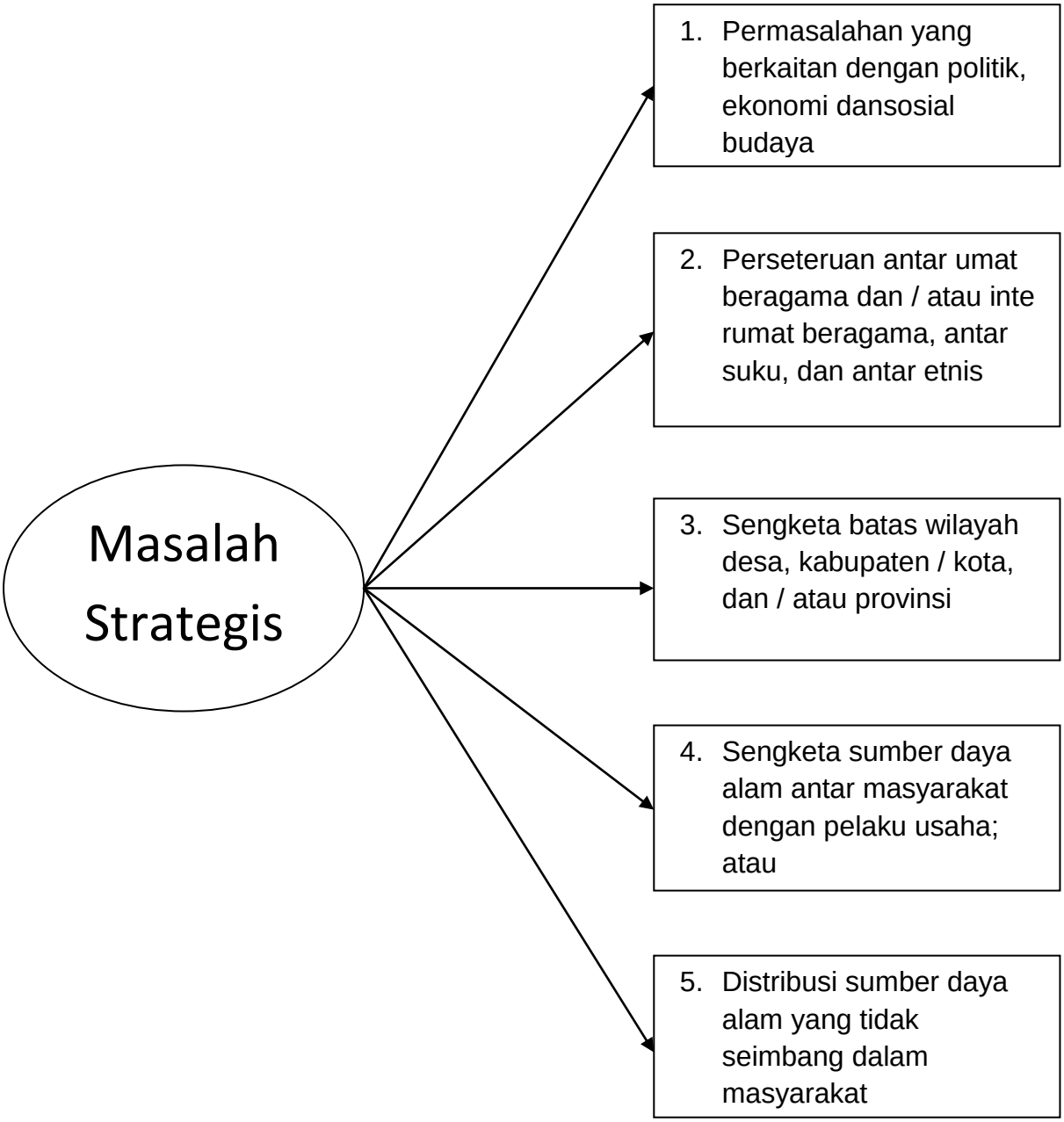

5

CASCADING KINERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2019

BUPATI

Tujuan :
Meningkatnya kondusifitas wilayah
Indikator Kinerja :
Persentasemasalah strategis yang ditangani (terkaitipoleksosbud dan Tibmas)

ES. II

Sasaran Strategis :
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Wilayah di Bidang IPOLEKSOSBUD
Indikator Kinerja :
Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipoleksosbud

ES. III

Program :
Kajian Masalah Strategis
Sasaran Program :
Meningkatnya kajian masalah strategis
Indikator Kinerja :
Jumlah potensi masalah strategis

Program :
Pengembangan Nilai – Nilai Kesatuan Bangsa
Sasaran Program :
Meningkatnya pengembangan nilai – nilai kesatuan bangsa
Indikator Kinerja :
Persentase capaian pengembangan nila-nilai kesatuan bangsa

Program :
Hubungan Antar Lembaga
Sasaran Program :
Meningkatnya hubungan antar lembaga
Indikator Kinerja :
Persentase capaian lembaga-lembaga daerah dan lembaga-lembaga masyarakat yang dibina dan difasilitasi

6

ES. IV

Kegiatan :	Kegiatan :
Pembinaan Wilayah	Peningkatan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Sasaran Kegiatan :	**Sasaran Kegiatan :**
Meningkatnya bina wilayah	Meningkatnya Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indikator Sasaran Kegiatan :	**Indikator Sasaran Kegiatan :**
1. Jumlah SKD yang teredukasi tentang pengamanan konflik IPOLEKSOSBUD 2. Jumlah desa rawan konflik yang terpantau	1. Jumlah fasilitasi deteksi dan cegah dini terkait permasalahan IPOLEKSOSBUD 2. Jumlah fasilitasi pengamanan tertutup 3. Jumlah fasilitasi pemantauan orang asing

Kegiatan :	Kegiatan :
Pembinaan Bela Negara	Pembinaan Wawasan Kebangsaan
Sasaran Kegiatan :	**Sasaran Kegiatan :**
Meningkatnya bela negara	Meningkatnya pembinaan wawasan kebangsaan
Indikator Sasaran Kegiatan :	**Indikator Sasaran Kegiatan :**
1. Jumlah fasilitasi peningkatan nilai - nilai Bela Negara 2. Jumlah fasilitasi peningkatan jiwa gotong royong	1. Jumlah kecamatan terpantau dalam kerukunan umat beragama 2. Jumlah kecamatan terpantau dalam kerukunan suku, budaya, dan ras 3. Jumlah siswa yang teredukasi wawasan kebangsaan

Kegiatan :	Kegiatan :
Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga – Lembaga Daerah	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga – Lembaga Kemasyarakatan
Sasaran Kegiatan :	**Sasaran Kegiatan :**
Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga – Lembaga Daerah	Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga – Lembaga Kemasyarakatan
Indikator Sasaran Kegiatan :	**Indikator Sasaran Kegiatan :**
1. Jumlah fasilitasi lembaga - lembaga daerah 2. Jumlah upaya pemecahan masalah IPOLEKSOSBUD yang terpantau	1. Jumlah Ormas yang terfasilitasi dana hibah 2. Jumlah Ormas / LSM yang terfasilitasi kelembagaannya

7

STAFF

Indikator Kinerja :	Indikator Kinerja :
Jumlah data keamanan dan ketertiban	Jumlah laporan analis pengaduan masyarakat
Jumlah data Intelijen	Jumlah laporan analis pertahanan dan keamanan
Jumlah laporan analis pengawas masyarakat	Jumlah laporan analis forum kewaspadaan dini masyarakat
	Jumlah laporan analis kebijakan pengabdian masyarakat

Indikator Kinerja :	Indikator Kinerja :
Jumlah data dan informasi tentang kerjasama permasyarakatan	Jumlah data dan informasi tentang wawasan kebangsaan
Jumlah data laporan / kajian tentang kerjasama pemasyarakatan	Jumlah data dan informasi tentang wawasan kebangsaan
Jumlah laporan / kajian tentang kerukunan umat beragama	Jumlah telaah dan kesimpulan data dan informasi tentang wawasan kebangsaan
	Jumlah laporan / kajian tentang wawasan kebangsaan

Indikator Kinerja :	Indikator Kinerja :
Jumlah Database Parpol dan bantuan keuangan Parpol	Jumlah data laporan di bidang organisasi masyarakat
Jumlah berkas di bidang ijin penelitian	Jumlah data LSM
Jumlah laporan Database Parpol	Jumlah data organisasi profesi, pemuda, dan keagamaan
Jumlah laporan verifikasi dan penelitian administrasi bantuan keuangan Parpol	

KETERKAITAN PROSES BISNIS DENGAN CASCADING

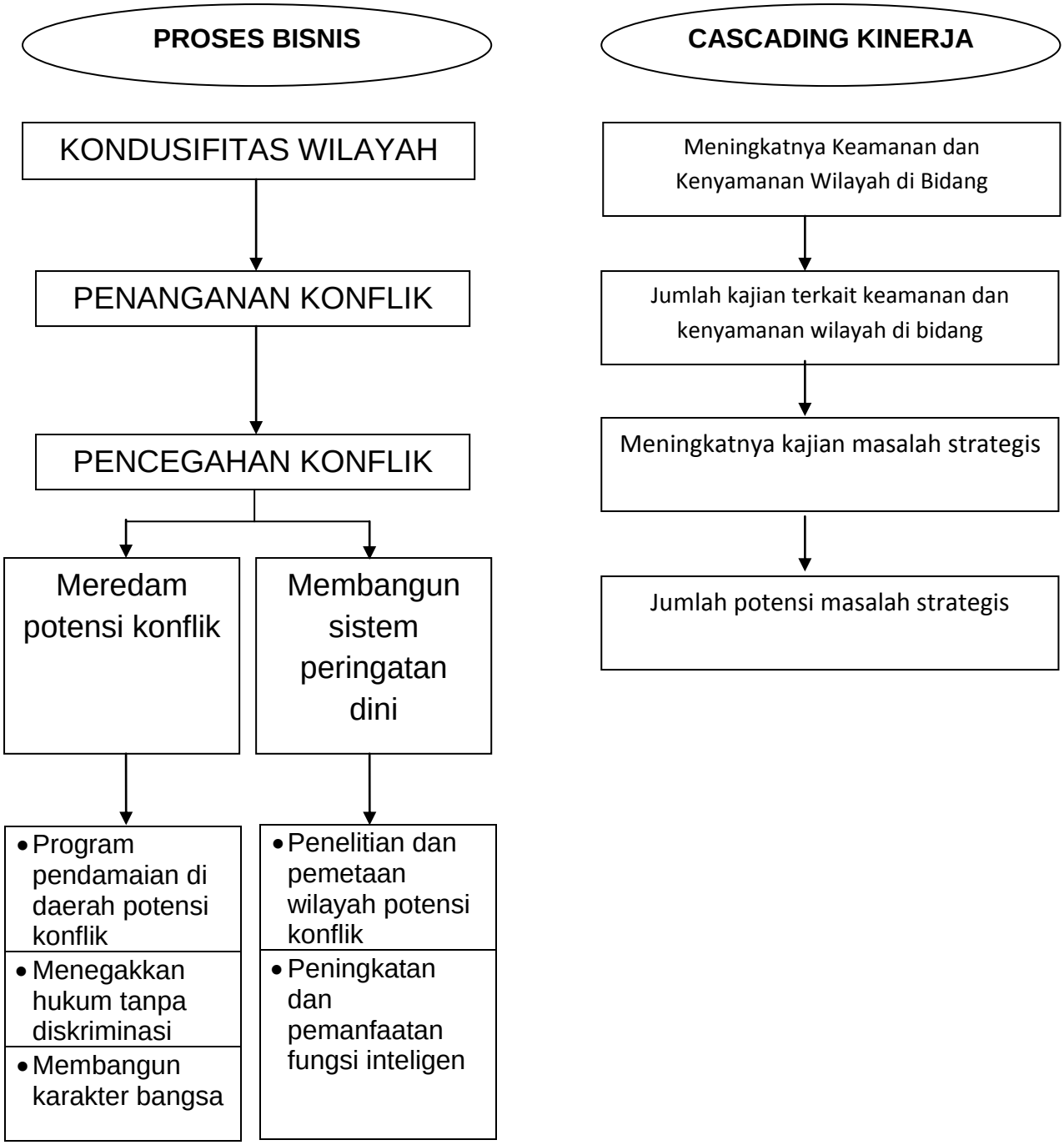

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN LUMAJANG

SESUAI PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 7 TAHUN 2018

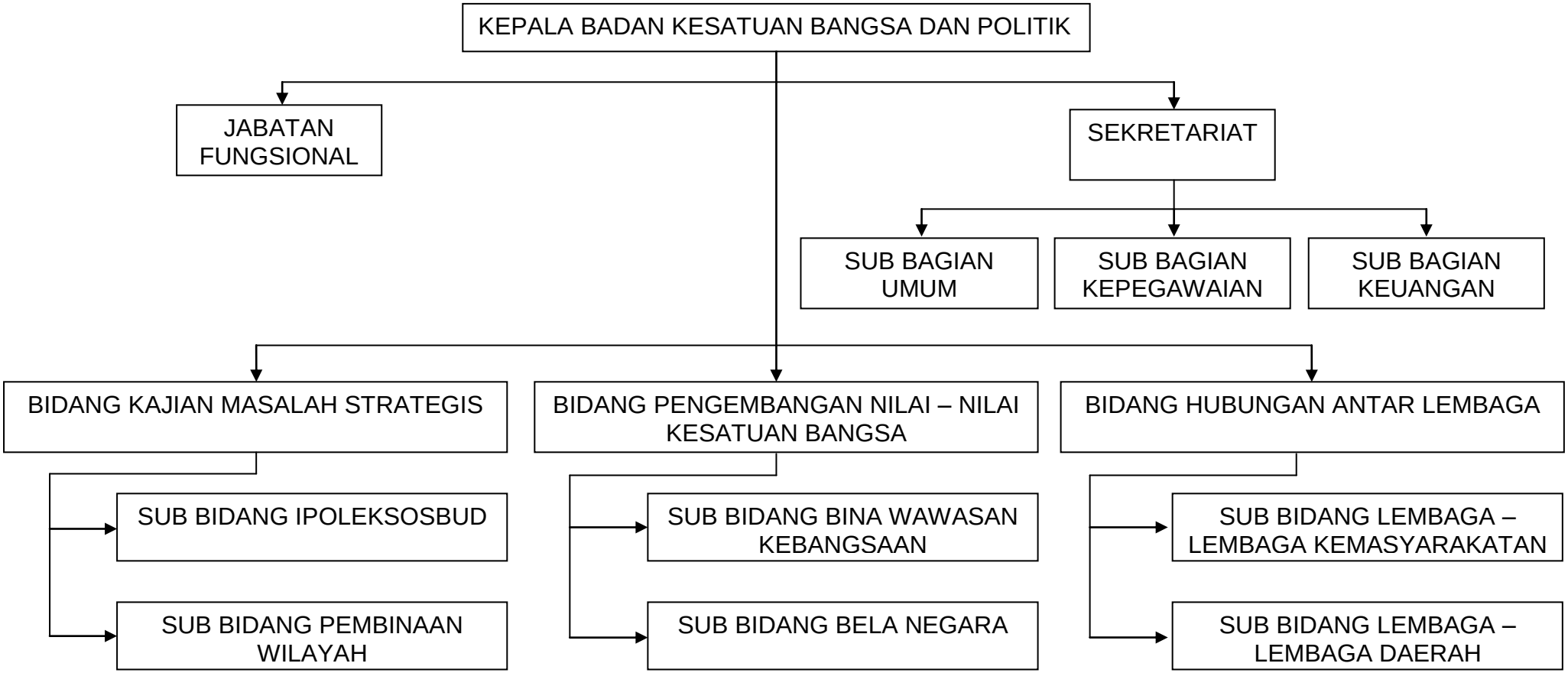

KETERKAITAN PROSES BISNIS DENGAN SOTK

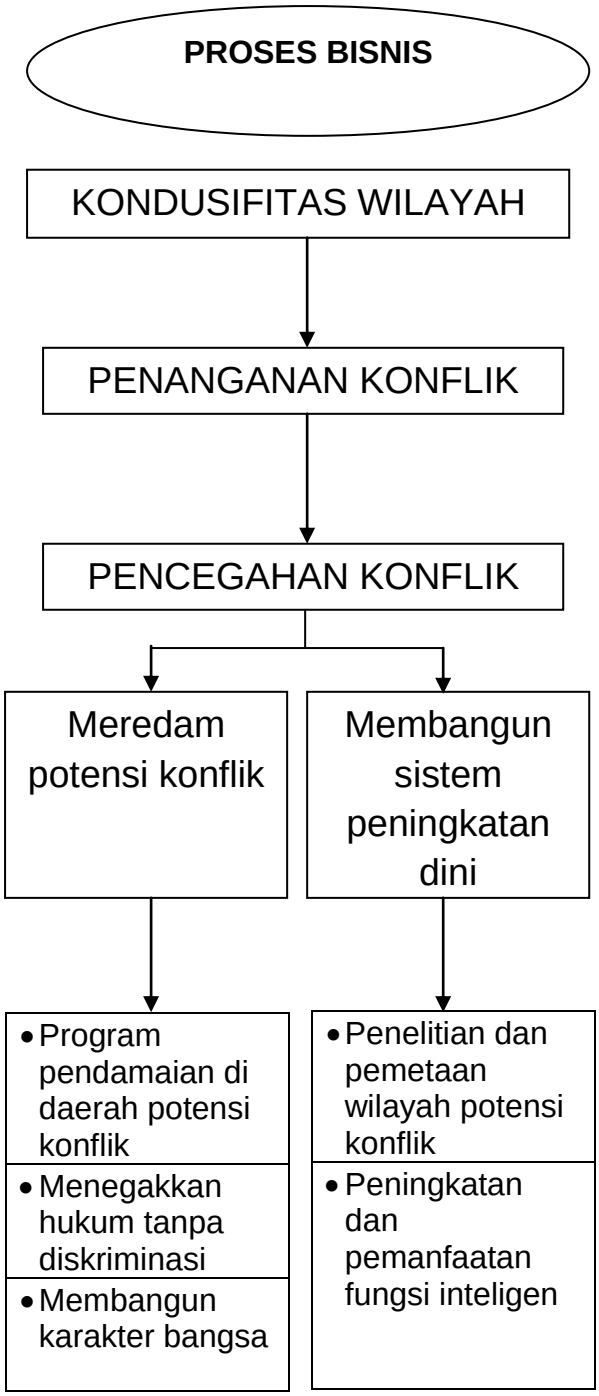

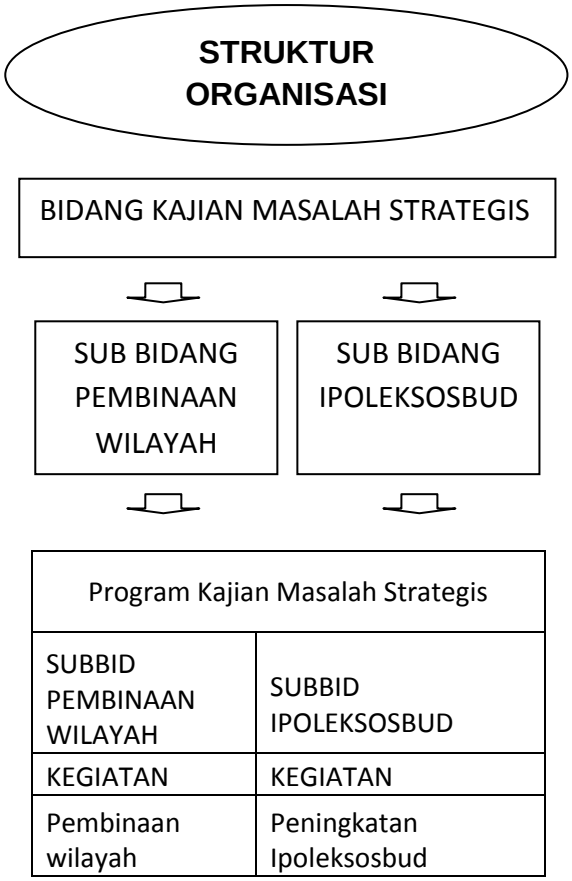

PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

Proses Managerial Pendukung =

Proses 4	Proses 5	Proses 6	Proses 7
Penerapan Budaya Politik Demokratis	Pemberdayaan Ormas/LSM Dalam Pembangunan Politik	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesadaran Bela Negara

Proses Inti =

Proses 1	Proses 2	Proses 3
Pencegahan Konflik	Penghentian Konflik	Pemulihan Pasca Konflik

Proses Lainnya =

Proses 8	Proses 9	Proses 10
Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Penbingkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penatausahaan Keaunagan dan Pembuatan Anggaran Pendapatan	Peningkatan SDM di lingkungan OPD BAKESBANGPOL

PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

1. Pencegahan Konflik =

Proses 1.1	Proses 1.2
Meredam Potensi Konflik	Membangun Sistem Peringatan Dini

1.1 Meredam Potensi Konflik =

Proses 1.1.1	Proses 1.1.2	Proses 1.1.3
Program perdamaian di daerah potensi konflik	Menegakkan hukum tanpa diskriminasi	Membangun karakter bangsa

1.2 Membangun Sistem Peringatan Dini =

Proses 1.2.1	Proses 1.2.2	Proses 1.2.3
Penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik	Peningkatan dan pemanfaatan fungsi inteligen	FKDM

PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

2. Penghentian Konflik =

Proses 2.1	Proses 2.2
Penetapan status keadaan konflik	Penanganan kekerasan fisik

2.1 Penetapan status keadaan konflik =

Proses 2.1.1	Proses 2.1.2
Pembatasan dan penutupan kawasan konflik	Pelanggaran yang memasuki kawasan konflik

2.2 Penanganan kekerasan fisik =

Proses 2.2.1	Proses 2.2.2
Dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri	Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat

PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

3. Pemulihan Konflik =

Proses 3.1	Proses 3.2	Proses 3.3
Rekonsiliasi	Rehabilitasi	Rekontruksi

3.1 Rekonsiliasi =

Proses 3.1.1	Proses 3.1.2	Proses 3.1.3
Perundingan damai	Rentetusi	Penataan

3.2 Rehabilitasi =

Proses 3.2.1	Proses 3.2.2	Proses 1.2.3
Psikologi	Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban	Penguatan relasi sosial

3.3 Rekontruksi =

Proses 3.3.1	Proses 3.3.2
Pemulihan fungsi pelayanan publik	Perbaikan sarana dan prasarana umum daerah

PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

4. Penerapan budaya berpolitik demokratis	=	Proses 4.1 Parpol terverifikasi	Proses 4.2 Pemantapan etiko poltik generasi muda
5. Pemberdayaan Ormas/LSM dalam pembangunan politik	=	Proses 5.1 Pembinaan Ormas/LSM	Proses 5.2 Penertiban politik masyarakat
6. Pengembangan wawasan kebangsaan	=	Proses 6.1 FKUB	Proses 6.2 Nilai – nilai budaya bangsa
7. Kesadaran bela negara	=	Proses 7.1 Kader Bela Negara	Proses 7.2 Forum Pembauran Kebangsaan / FPK

PETA PROSES BISNIS LEVEL SELANJUTNYA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

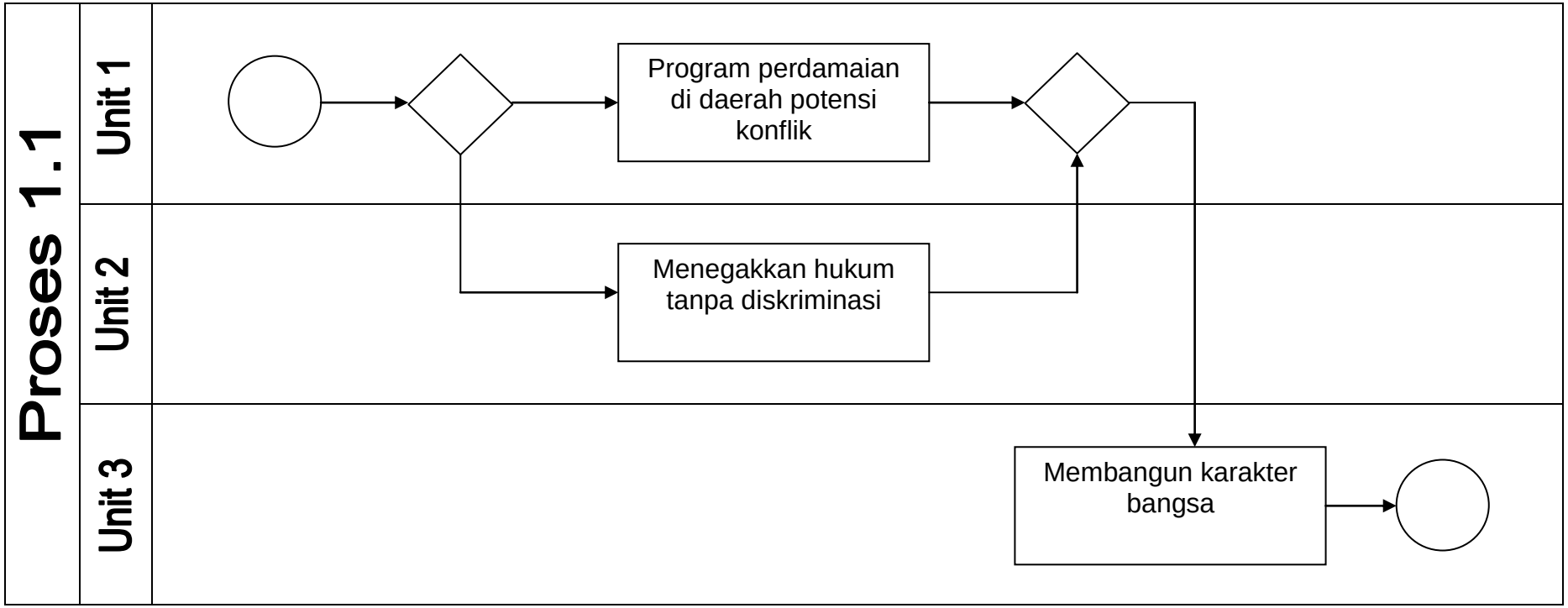

PETA PROSES BISNIS LEVEL SELANJUTNYA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

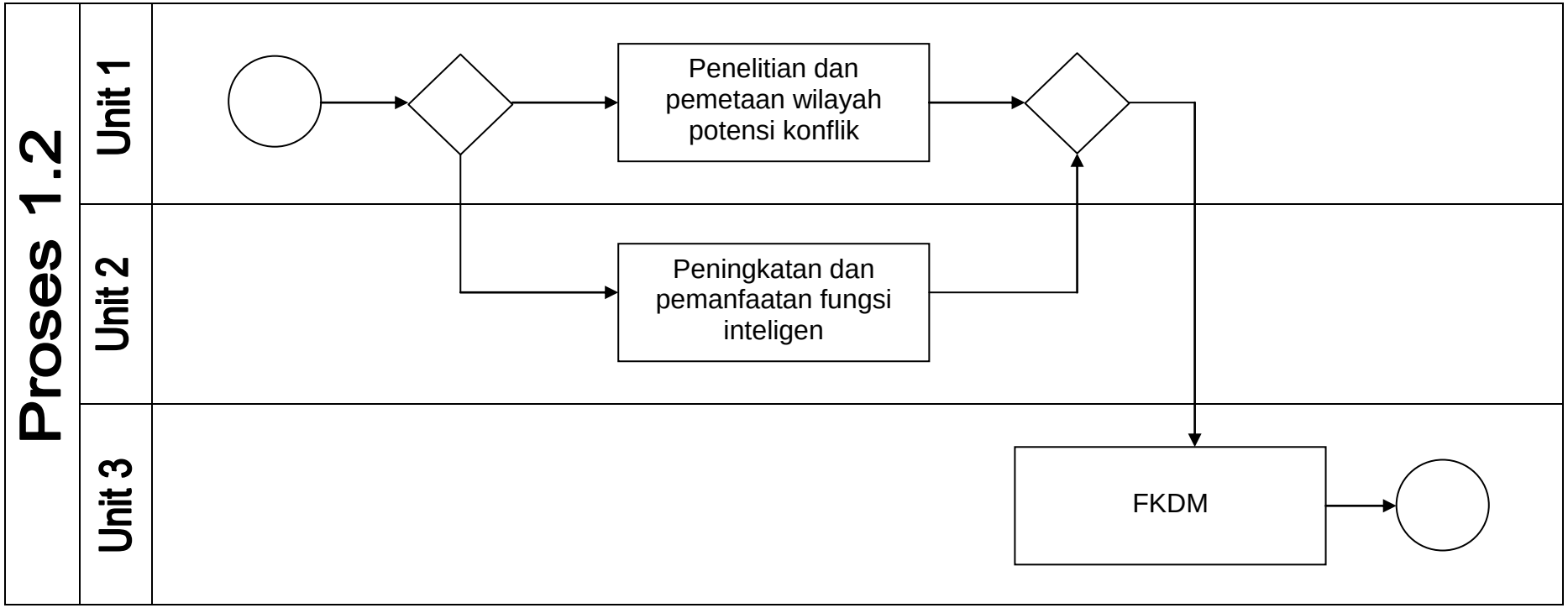

PETA PROSES BISNIS LEVEL SELANJUTNYA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

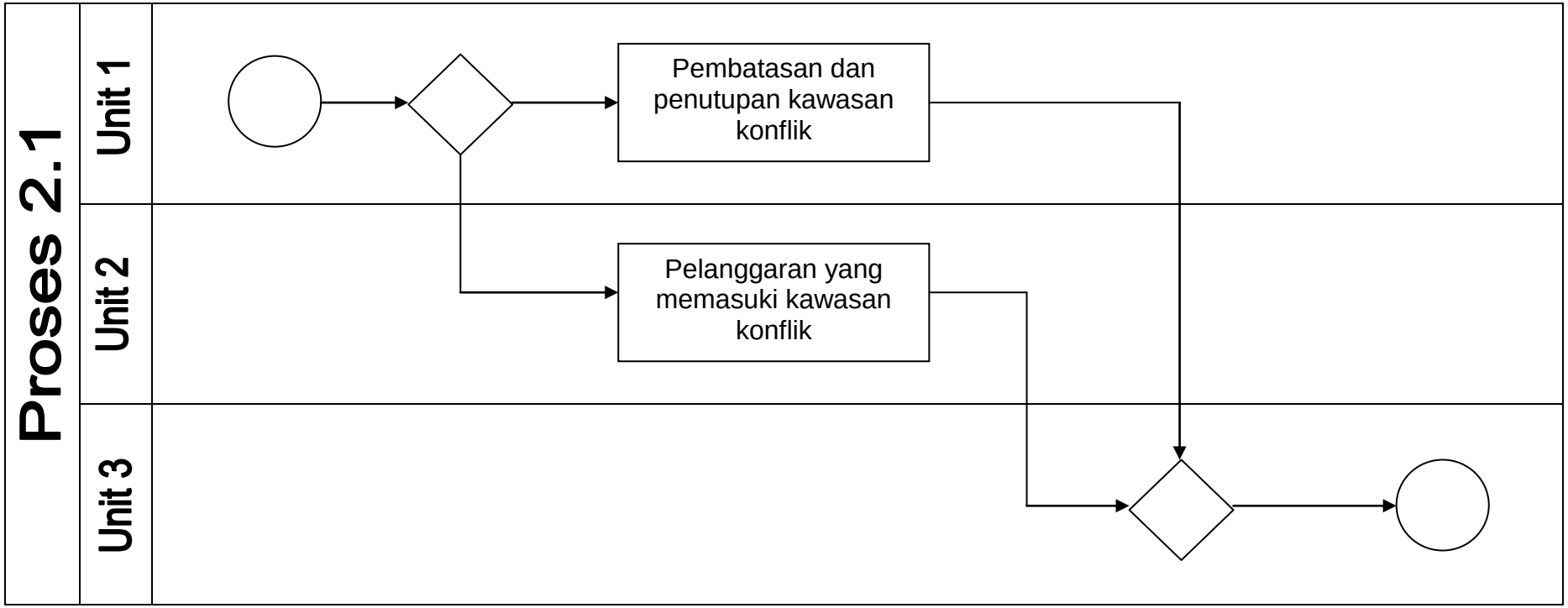

PETA PROSES BISNIS LEVEL SELANJUTNYA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

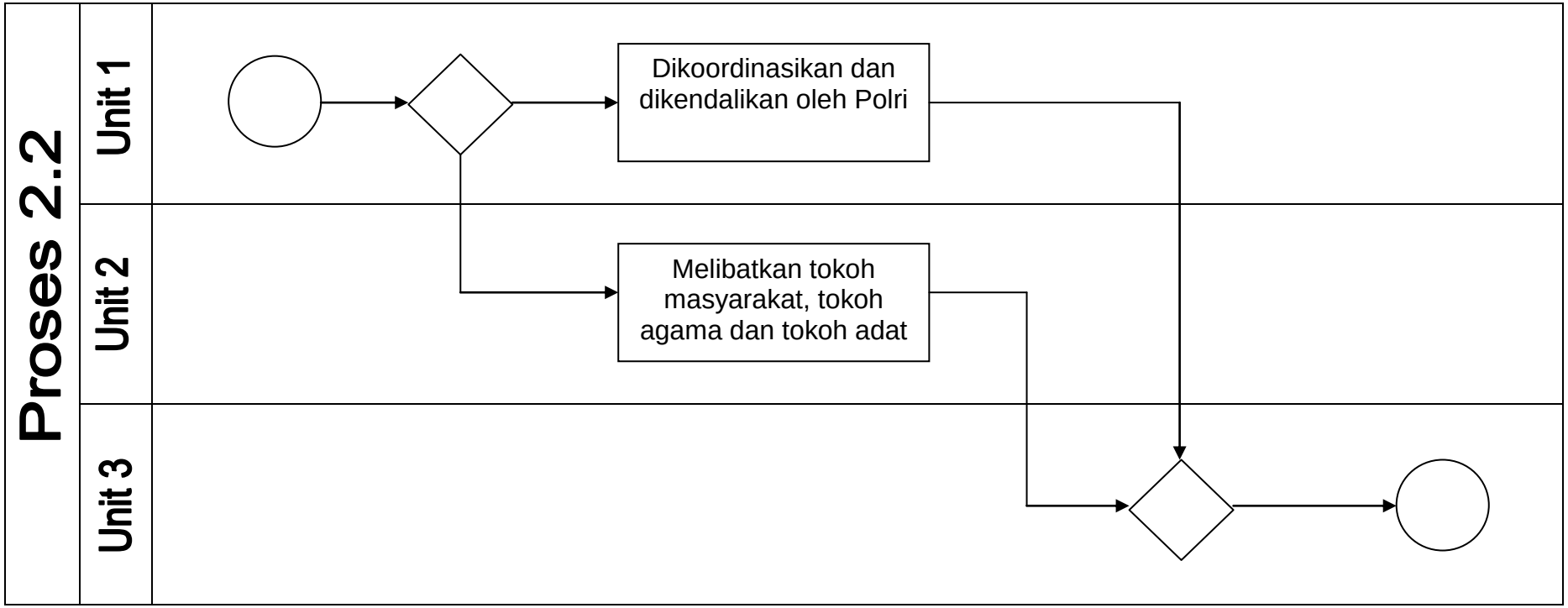

PETA PROSES BISNIS LEVEL SELANJUTNYA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

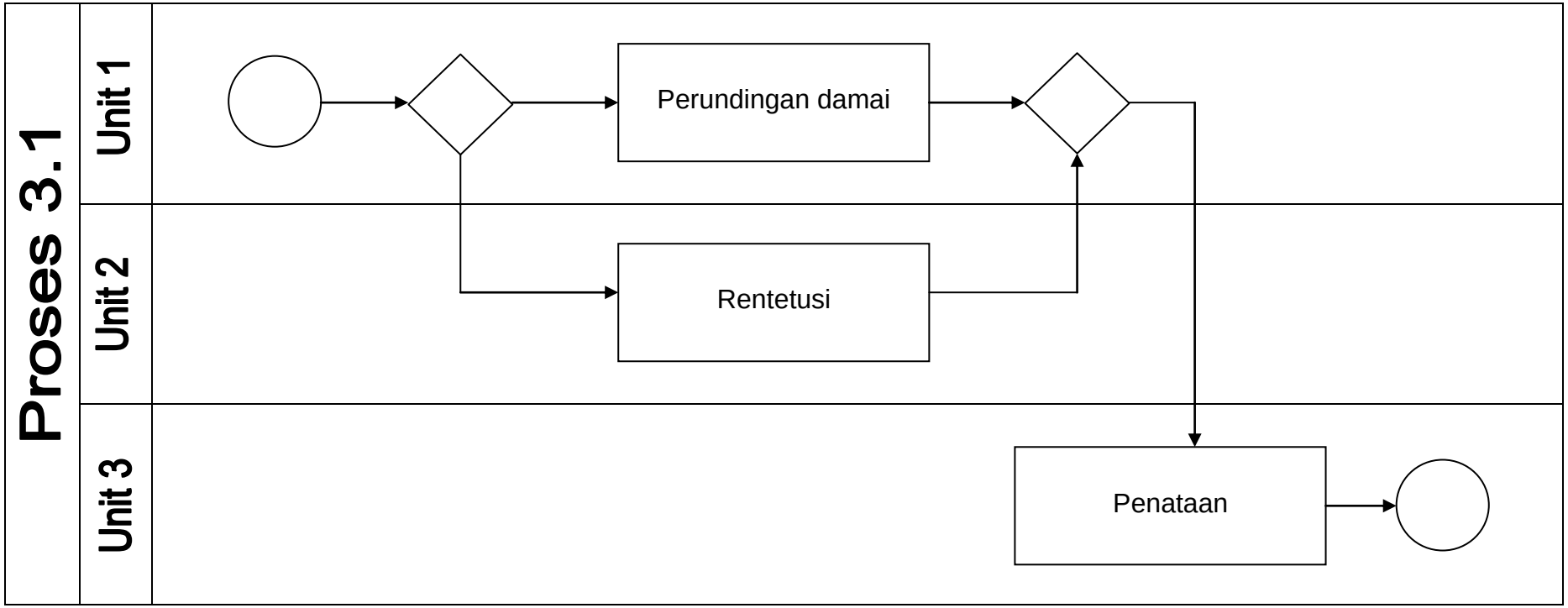

PETA PROSES BISNIS LEVEL SELANJUTNYA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

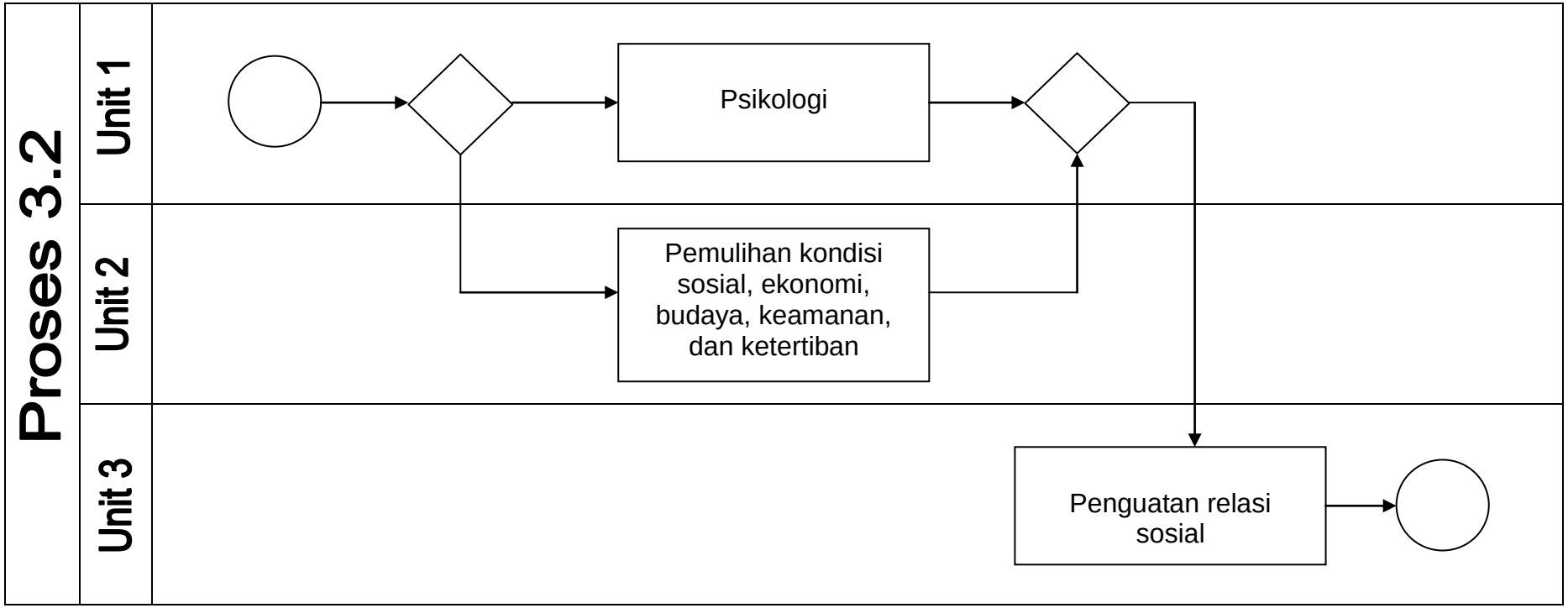

PETA PROSES BISNIS LEVEL SELANJUTNYA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

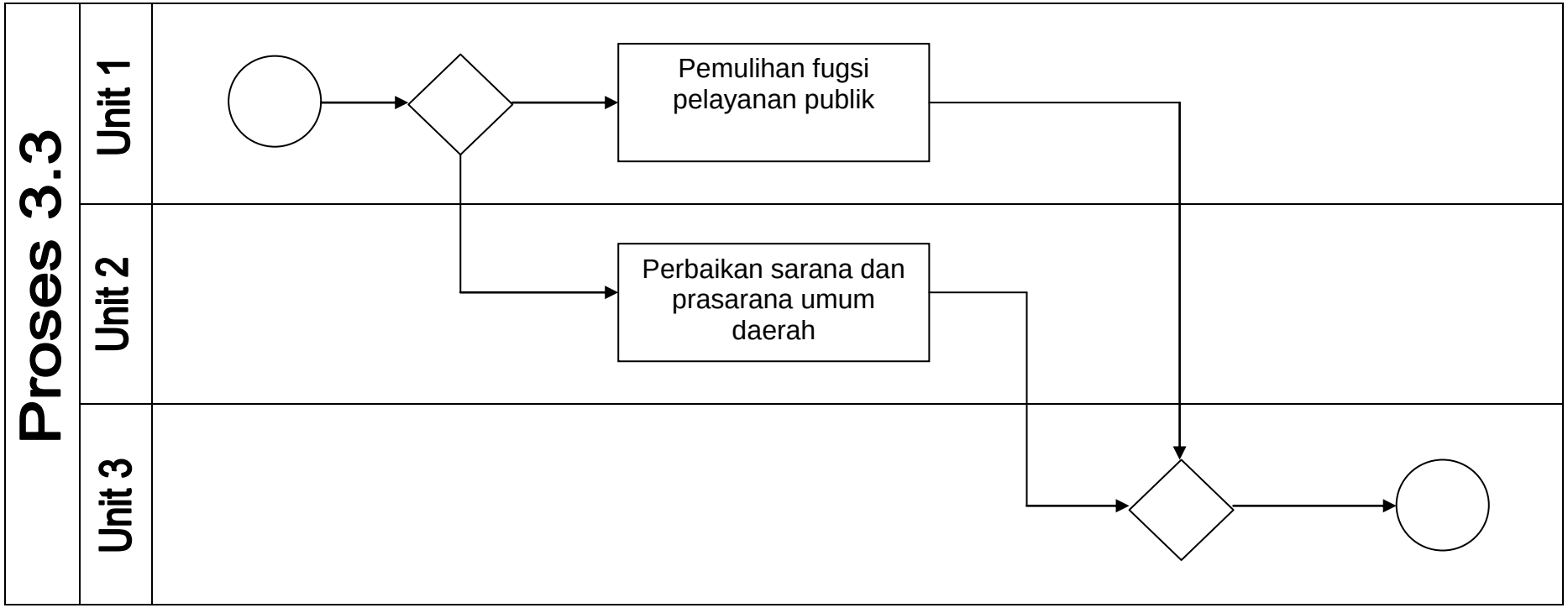

PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

Proses 1
- KPU
- BAWASLU
- PARPOL
- DISKOMINFO

Proses 2
- DINDIK
- DISPORA
- DISKOMINFO
- BAG. TAPEM
- BAG. HUKUM

Proses 3
- ORMAS
- LSM
- ORGANISASI KEPEMUDAAN
- ORGANISASI PROFESI
- ORGANISASI KEAGAMAAN
- ORGANISASI WANITA

Proses 4
- POLRES
- KODIM
- SATPOL PP
- KEJAKSAAN
- FKDM

Proses 5
- POLRES
- KODIM
- YONIF
- SATPOL PP
- KEJAKSAAN
- PENGADILAN NEGERI

Proses 6
- POLRES
- KODIM
- SATPOL PP
- DINSOS
- DINAS PU / TR
- DPKP
- BPBD
- RSUD

Proses 7
- SEMUA OPD

Proses 8
- SEMUA OPD

Proses 9
- DINAS PENDIDIKAN
- KODIM
- POLRES
- BNN
- DISPORA

VISI, MISI, KETERKAITAN RENSTRA DENGAN RPJMD KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 – 2023

VISI :
Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat

RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG			RENSTRA BAKESBANGPOL KABUPATEN LUMAJANG			
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	3. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat	1. Meningkatnya kondusivitas wilayah	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait ipoleksosbud dan Tibmas)	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Wilayah di Bidang IPOLEKSOSBUD	Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipoleksosbud

MATRIK RENSTRA BAKESBANGPOL KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018 - 2023

CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN										
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA	TAHUN						Strategi kebijakan	Program
			2019	2020	2021	2022	2023			
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Wilayah di Bidang IPOLEKSOSBUD	Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipoleksosbud	Jumlah potensi masalah strategis	1.323 Potensi Masalah	1.097 Potensi Masalah	933 Potensi Masalah	793 Potensi Masalah	674 Potensi Masalah		1. Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat terhadap masalah, idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban. 2. Peningkatan pengembangan nilai - nilai kesatuan bangsa. 3. Peningkatan hubungan antar lembaga	1. Kajian Masalah Strategis
		Jumlah kecamatan terpantau dalam kerukunan umat beragama dan Jumlah kecamatan terpantau dalam kerukunan suku, budaya, dan ras / Jumlah kecamatan yang ada X 100%	33,33 %	47,62 %	61,90 %	76,19 %	90,48 %			2. Pengembangan nilai - nilai keastuan bangsa
		Jumlah lembaga-lembaga daerah dan lembaga-lembaga masyarakat yang dibina dan difasilitasi / Jumlah lembaga-lembaga daerah dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada X 100%	8,2 %	8,9 %	9,5 %	10,3 %	10,95 %			3. Hubungan Antar Lembaga

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Telp (0334) 881586 Fax (0334) 881586
email : kesbangpol@lumajang.go.id
LUMAJANG – 673103

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188.45/2042/427.75/2019

TENTANG

PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat yang tertuang pada Poin 3.3 Tahap Penerapan/Implementasi Bab III Tahapan Penyusunan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dipandang perlu menetapkan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023;
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Peta proses bisnis instansi pemerintah di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tujuan penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diatas adalah :

a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
b. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023; dan
c. Memiliki asset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

KETIGA : Manfaat penyusunan Peta Proses Bisnis instansi pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diatas adalah:

a. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi

penyempurnaan proses lebih terarah; dan

b. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT :

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 13 September 2019

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. BASUNI
NIP 19620727 198512 1 001

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang;